

**PERAN BANTUAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA TOWERA KECAMATAN SINIU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

*Di ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

SALMA
NIM:15.3.12.00.81

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini,menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Bantuan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Ekonomi Islam” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa Ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh karenanya, batal oleh hukum.

Palu, 22 Oktober 2019 M
22 Shafar 1441 H

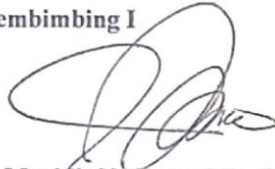
Penulis: 
SALMA
NIM. 15.3.12.0081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang berjudul “Peran Bantuan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Ekonomi Islam” Oleh SALMA NIM: 15.3.12.0081, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, Maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di ajukandi hadapan Dewan Penguji.

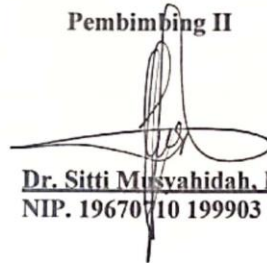
Palu 22 Oktober 2019 M
22 Shafar1441 H

Pembimbing I



Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag.
NIP : 19541231 198703 1 003

Pembimbing II



Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.
NIP. 19670710 199903 2 005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu



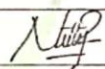

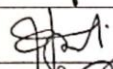
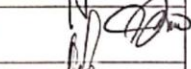

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Salma NIM. 15.3.12.0081 dengan judul “Peran Bantuan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Ekonomi Islam”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 22 November 2019 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabi’ul-Awal 1441 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


Palu, November 2019 M
Rabi’ul-Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.	
Munaqisy 1	Dr. Gani Jumat, M.Ag.	
Munaqisy 2	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	
Pembimbing 1	Dr.H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag.	
Pembimbing 2	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19770331 200312 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَابَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat nikmat dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang di rncanakan. Shalawat dan salam, tak lupa kami haturkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad Saw.,Sang tauladan dan penyempurna akhlak, beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Segala daya dan upaya yang maksimal telah penulis lakukan demi kesempurnaan Skripsi ini, namun sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan Skripsi ini. Dalam penyusunan Skripsi ini berbagai hambatan dan keterbatasan dihadapi oleh penulis namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Skripsi ini, berkat bantuan bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak, hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu segala masukan dan saran yang bersifat membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini, mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis Bapak Ahsan Sandou. dan Ibu Saleha yang telah membesarkan, mendidik, membiayai dan terus memberi motivasi dalam pelaksanaan studi penulis. Serta kepada

2. Bapak Prof. Dr. H.Sagaf Pettalonggi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu
Bapak Dr. Abidin M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang akademik dan
Pembangunan lembaga, Dr. H. Kamaruddin M. Ag. Selaku Wakil Rektor
Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan, dan Drs. H.
Iskandar M.Sos.I selaku Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan
kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
menambah ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam, Bapak Nurdin. S,Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D selaku wakil
dekan bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan kerjasama,
Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. Selaku wakil dekan bidang Administrasi
umum, perencanaan, keuangan yang memberikan fasilitas serta pelayanan
akademik dan administrative yang baik selama penulis melakukan studi
4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,
sekaligus pembimbing Akademik dan pembimbing dua, dan Bapak Nur
Syamsu, S.Hi., M.SI yang memberikan kemudahan untuk menentukan
judul dan membantu penyusun skripsi ini dengan baik sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. Bapak Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag. selaku pembimbing I yang
telah memberikan nasehatnya, sehingga penulis dapat melaksanakan
tugasnya dengan penuh kesabaran sehingga selesainya skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN), yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu
pengetahuan serta nasehat nasehat kepada penulis selama kuliah.
7. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.

8. Ibu Supriani S.Ag selaku kepala perpustakaan IAIN Palu yang banyak membantu para mahasiswa dalam referensi buku di perpustakaan.
9. Suami saya Moh. Sahril yang mana telah menjadi motivasi bagi saya dan juga telah membantu dalam membiayai dan selaluh mendukung saya dalam menyelesaikan studi dan anak saya Syiron Mubarak yang menjadi motivasi tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Moh Adil Rantesigi selaku sekretaris Desa Towera serta seluruh Staf yang telah mengizinkan meneliti di Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong.
11. Seluruh rekan-rekan yang telah banyak memberikan sumbangsihnya baik materi maupun dorongan moril kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan
12. Saudara-saudara senasib dan seperjuangan di jurusan Ekonomi Syariah 3 angkatan 2015, terimakasih atas semua dorongan kebersamaan kalian.

Akhirnya, penulis berharap semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt. Semoga Skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Palu; 22 November 2019 M
Rabi'ul-Awal 1441 H

Penulis

Salma
NIM. 15 3 12 0081

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis-garis Besar Isi	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian terdahulu	10
B. Dana Desa.....	11
1. Pengertian Dana Desa.....	11
2. Sumber Dana Desa.....	12
3. Tujuan Dana Desa.....	13
4. Pengalokasian Dana Desa.....	14
5. Penggunaan Dana Desa	15
6. Dasar Hukum Dana Desa.....	17
C. Pemberdayaan Masyarakat	17
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	17
2. Tujuan Pemberdayaan.....	18
3. Sasaran Pemberdayaan	20
D. Nilai Dasar Bantuan Dalam Islam	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	28

C. Kehadiran Peneliti	28
D. Data dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	21
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
BAB VI HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong	34
B. Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Melalui Bantuan Dana Desa	42
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Masy- Arakat.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 1 Jumlah Dusun dan Rukun Tetangga (RT) tahun 2019
2. Sejarah Pemerintahan Desa Tahun 1923-2019
3. Tabel 3 Kondisi Sosial Budaya Desa (Potensi Sumber Daya Manusia) tahun 2019
4. Tabel 4 Mata Pencarian Masyarakat Desa Towera Tahun 2019
5. Tabel 5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Towera Tahun 2019
6. Tabel 6 Keberagam Agama yang Ada di Desa Towera Tahun 2019
7. Tabel 7 Sumber Pendapatan Dana Desa dari Tahun 2015-2019
8. Tabel 8 Bidang Pembangunan dan pemberdayaan melalui Dana Desa dari Tahun 2015-2019

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Meneliti
4. Surat keterangan Meneliti
5. Pedoman Wawancara
6. Daftar Nama Informan
7. Dokumentasi
8. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Salma
NIM : 15.3.12.0081
Judul Skripsi : Peran Bantuan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Skripsi ini membahas tentang Peran Bantuan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Tujuan adanya penelitian ini yang *pertama*, untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field researd), sifat penelitian ini ialah dekskriptif analintik, teknik penggumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif bersifat induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat di ketahui bahwa upaya yang dilakukan pemeritah desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa telah terlaksanakan dengan baik dari tahun 2015-2019 telah mengalami peningkatan dilihat dari pembanguna infrastruktur dan pemberdayaan perekonomian masyaraat juga sudah meningkat. Akan tetapi untuk pengelolaan dana desa tersebut belum terealisasi dengan baik dikarenakan belum adanya timbal balik dari masyarakat kepemerintah desa. Kebijakan yang dlakukan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya berpatokan dengan nilai dasar ekonomi Isalam yang mana dalam hal ini juga perna dilakuan oleh Rasulullah Saw pada masanya yaitu : 1. Kepemilikan, 2. Keseimbangan, dan 3. Kadilan. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada didesa, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan keputusan bersama dalam musyawarah rencana pembangunan desa.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap bahwa pemerintah desa dapat terus meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat terus mengalami peningkatan baik pemberdayaan maupun pada ekonomi masyarakat. Dan mengharapakn pemerintah lebih mementingkan pendidikan anak, dimana disini kebanyakan masyarakat kurang mampu menyekolakan anaknya sedangkan anak tersebut berkeingin untuk melanjutkan sekolahnya kejnjang yang lebih tinggi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam era pembangunan khususnya pembangunan untuk masyarakat pedesaan, saat ini banyak sekali ditemukan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat kompleks. Hal itu dapat dilihat dari mayoritas tingkat pendidikan yang cenderung masih relatif rendah, tingkat perekonomian yang tergolong miskin, begitu juga pengetahuan yang masih relatif sedikit, yang kemungkinan besar tidak mau begitu saja menerima berbagai inovasi, gagasan-gagasan dan ide-ide baru dari pembangunan yang disampaikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang¹

¹ Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 , h.29 – 41 <https://core.ac.uk/download/pdf/48593374.pdf> di akses pada 01 Juni 2019.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa, yaitu Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.²

Sehingga Kebijakan dana desa dalam APBN 2015 disebutkan bahwa adanya penetapan alokasi dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa, juga dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.³

Begitu penting dan strategisnya dana Desa, sehingga wajar apabila dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi telah mempelajari dan

² http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

³ Rivan Nugraha, Peran Program Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat, (Studi deskriptif di Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung kabupaten cianjur). <http://digihb.uinsgd.ac.id/3934/> Diakses pada 22 Juni 2019, pukul 14. 28

mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait dana Desa.⁴

yang berada di perkampungan. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang

⁴ Endang Juliana, *Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2266>, di akses pada 24 Juni 2019, pukul 18.51

holistik dan strategis.⁵ Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik.

Maka dengan adanya Dana desa sekarang ini juga merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi local yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, pengelolaan dana desa Towera dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat belum dapat terfokus kesana, karena pemerintah desa masih terfokus dalam pembangunan infrastruktur desa.

Beberapa program atau kebijakan pemerintah desa Towera yang telah dilakukan pada tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program pembangunan pengerasan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan gorong-gorong. Sedangkan pada tahun 2016 digunakan untuk melanjutkan beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, seperti pengerasan jalan perlintasan ekonomi masyarakat dan lainnya begitu pada tahun tahun berikutnya pemerintah Desa Towera terus melanjutkan program-program yang di usulkan masyarakat. Setelah 4 tahun

⁵ Mutthoriq dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No 3, h.426-432.

berturut pemerintah dapat menjalankan beberapa program secara maksimal dibandingkan dengan sebelum adanya dana desa sebagai pendorong pembangunan dan pemberdayaan.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran.

Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain. Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong-royong sesama warga desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa Towera sebelum adanya dana desa memang terlihat cukup kurang, atau sekalipun ada belum mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya itu, keadaan infrastrukturpun masih belum baik, seperti jalan, jembatan dan yang lainnya . seingga masyarakat sangat bersyukur dengan adanya dana desa skarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa Towera Bapak Maskur, menuturkan bahwa semenjak adanya dana desa ini pemerintah telah melakukan program pembangunan infrastruktur didaerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil musyawara antar dusun, yang kemudian di ajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan

pedesaan. Dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan merasa terbantu.⁶

Selanjutnya, masyarakat berharap program pembangunan ataupun program lainnya yang dirasa dapat bermanfaat, akan terus dilaksanakan dan terus hadir bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dengan adanya program dana desa harus dijadikan sebagai sebuah momentum dalam melaksanakan pengembangan serta pemberdayaan desa dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, diperlukan partisipasi semua pihak, terutama bagaimana peran dari kepala desa serta aparatur pemerintahan desa mampu mengalokasikan dana desa ini secara tepat bagi pembanguan desa dan masyarakat. Maka dari itu, penulis tertarik melelakukan penelitian yang berjudul “Peran Bantuan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Prespektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas masalah pokok bagaimana Peran Bantuan Dana Desa dalam pemberdayaan Masyarakat maka munculah sub-sub masalah yaitu :

- a. Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa?
- b. Bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam terhadap pemberdayaan masyarakat tersebut?

2. Batasan masalah

Agar pembahasan skripsi ini memiliki sasaran yang dapat dijangkau maka penulis perlu mengemukakan batasan masalah yakni penulis akan

⁶ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di didesa Towerakecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong ,pada tanggal 20 juni 2019

mengambil sebuah peran bantuan dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Desa Towera
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam terhadap pemberdayaan masyarakat tersebut.

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan ilmiah, sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan praktis, sebagai media yang bisa menjadi modul layak baca bagi khalayak ramai.

D. Penegasan Istilah

Proposal Skripsi ini berjudul ” Peran Bantuan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Prespektif Ekonomi Islam” agar pembahasan dalam skripsi ini menjadi terarah dan terfokus kepada sasaran pembahasan maka berikut penulis paparkan pengertian judul skripsi ini menurut bahasa dan istilah. Adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Peran ialah serangkaian perilaku yang di harapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang di dibrikan secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapa mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.⁷

⁷ Departemen Pendidikan nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h.420

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.⁸
3. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja.⁹
4. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.¹⁰

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi para pembaca terhadap pembahasan skripsi ini, maka penulis membahas secara garis besar apa yang menjadi analisis kedepan masalah ini sebagai berikut :

⁸ A Saibani., *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bee Media Pustaka, 2015, h.4

⁹"Pemberdayaan Masyarakat". Wikipedia The Free Encyclopedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat di akses pada 23 Juni 2019

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 69

Bab I, Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi proposal skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka, membahas tentang penelitian terdahulu, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Nilai Dasar Bantuan dalam Islam.

Bab III, metode penelitian, membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Hasil Penelitian, membahas tentang gambaran umum desa Towera, Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, dan pandangan ekonomi Islam tentang pemberdayaan masyarakat.

Bab V, merupakan bab penutup yang isinya memberikan beberapa kesimpulan dan pembahasan skripsi ini. selanjutnya dikemukakan implikasi penelitian berupa saran-saran yang sifatnya konstruktif dan memberikan kontribusi bagi kesempurnaan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan, dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama.

Pertama, Risma Hafid, “Pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Desa Mangil, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep Tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam membangun Desa Mangil, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep efektif, dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Mangilu sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program-program.¹¹

Kedua, Sigit Suwardianto, “Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoagung adalah pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan prasarana fisik dan prasarana non fisik, dengan indikator peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat dan peranan kepala desa dalam koordinasi pembangunan secara partisipatif yang meliputi bidang ekonomi,

¹¹ Risma Hafid, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep 2016*, Skripsi <https://repository.unhas.ac.id> di akses pada 29 Mei 2019

kesehatan, sosial, dan politik. Sasaran pemberdayaan masyarakat mengarah pada pembinaan generasi muda dan perbaikan ibu hamil dan balita. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung peranan kepala desa adalah keturunan, kewibawaan, dan kekuasaan. Faktor penghambat peranan kepala desa adalah kondisi penduduk, partisipasi penduduk, dan fasilitas atau peralatan. Pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa dengan konsep kesadaran dan kemauan masyarakat melalui koordinasi secara partisipatif dari masyarakat sehingga peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat berjalan efektif.¹²

Ketiga Erni Tahir, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. (2). Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹³

Dari ketiga penelitian terdahulu dapat dilihat persamaannya dimana dana desa maupun peran kepala desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan perbedaan yang bisa kita lihat yaitu dari segi penelitian dan lokasi yang diteliti.

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran

¹² Sigit Suwardianto, “Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.2016 Skripsi <https://repository.unhas.ac.id> di akses pada 29 Mei 2019

¹³ Erni Tahir, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. <http://sitedi.uho.ac.id> di akses pada 30 september 2019

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa) Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dengan adanya dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa¹⁵

2. Sumber dana desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.¹⁶ Belanja Negara terdiri dari belanja

¹⁴ A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (jakarta, Media Pustaka.2014), h. 4

¹⁵ Risma Hafid, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep 2016*, Skripsi <https://repository.unhas.ac.id> , 23

¹⁶ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan sirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.¹⁷

3. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :¹⁸

¹⁷ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

¹⁸ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

4. Pengalokasian Dana Desa

- a. Dana desa setiap kabupaten/kota di alokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
- b. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.
- c. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot : 30% untuk jumlah penduduk , 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.

- d. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur.¹⁹

5. Penggunaan Dana Desa

a. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasaran kesehatan masyarakat;
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

¹⁹ Endang Juliana, *Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2266> , 22 di akses pada 24 Juni 2019, pukul 18.51

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
7. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.²⁰

²⁰ *Ibid*, h. 23

6. Dasar Hukum Dana Desa

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.²¹
- c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- f. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).²² Oleh karena itu, pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan masyarakat yang sejahtera.

²¹ Pejabat pengelolaan Informasi dan dokumentasi (PPID). “Regulasi Peraturan Dana Desa” Situs resmi ppidKemkominfo. <https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/peraturan-dana-desa/> di akses pada 26 juni 2019 11.05

²² Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung, Alfabeta, 2014, h. 48.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang banyak diterima dan dikembangkan. Dimana pemberdayaan harus berpihak pada pentingnya individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya.²³

Pemberdayaan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus, bersabar dan telaten. Filosofi pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kontra produktif. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan /

²³ Ibid,58

kesenjangan / ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.²⁴

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.²⁵

Jadi tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi

²⁴ Sigit Suwardianto, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman* 18. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pls/article/viewFile/636/630> di akses pada 28 juni 2019 16.36

²⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial, Cet.5,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 63.

mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

3. Sasaran Pemberdayaan

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jauh lebih tepat daripada memberikanikan”. Di samping itu lembaga swadaya masyarakat merupakan agen yang mendapat posisi penting, karena dipandang lebih bersifat *entrepreneur*, berpengalaman dan inovatif dibandingkan pemerintah. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya sering dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan ada tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.

D. Nilai Dasar Bantuan dalam Islam

Allah SWT berfirman dalam surah Al –Maidah (5) 2 yakni :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahanya :

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.²⁶

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya yayasan penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Qur'an*, (Semarang: PT Karya Putra. 2002),142

Dalam ayat di atas kata *وَتَعَاوَنُوا* menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran yang merupakan ketakwan. Dan dia Azza Wa Jalla melarang mereka mendukung kebatilan dan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan perkara haram ayat yang ini juga mencakup semua jenis bagi kemeslahatan para hamba di dunia maupun di akhirat, baik antara mereka dengan sesama, ataupun dengan Rabbnya. Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban; kewajiban individual terhadap Allah Swt dan kewajiban sosialnya terhadap sesamanya.

Dengan jelas ayat di atas memuat kewajiban saling membantu di antara kaum muslimin untuk menegakkan agama dan larangan bagi mereka untuk bekerja sama dalam menodainya. Bukan sebaliknya yaitu malahan melemahkan semangat beramal orang, mengejek orang yang berusaha kontisten dengan syariat maupun menjadi dalang trsebar nya perbuatan maksiat di tengah masyarakat.

Hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah Swt dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah puncak kebahagiaan seorang hamba, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan hal tersebut, dan itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti dari agama. Sebagai contoh sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, Rasulullah Saw bersabda :

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو
أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ
كُرْبَتَهُ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya :

"Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: " Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat "(HR Bukhari).²⁷

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. mengajarkan kepada kita agar saling tolong-menolong. Tolong menolong atau ta'awun merupakan kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri. Kenyataan telah membuktikan, bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain, pasti tidak akan dapat dilakukan secara sendirian meskipun dia seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu. Ini menunjukkan, bahwa tolong-menolong dan saling membantu merupakan sebuah keharusan dalam hidup manusia.

Al-Qur'an dan hadits juga banyak menjelaskan bahwasannya memberikan sesuatu kepada orang yang fakir berarti memberikan sesuatu tersebut kepada Allah. Maka barangsiapa yang membantu seseorang untuk membutuhkan suatu bantuan maka seolah-olah ia telah meminjamkan sesuatu kepada Allah.

Oleh karena itu, belum dianggap sempurna keimanan seseorang manakala dirinya kekenyangan sementara tetangganya berada dalam kondisi kelaparan dan dia mengetahui akan hal itu serta mampu meringankan beban mereka.

Islam bukanlah agama yang tidak menganjurkan pemeluknya untuk hidup bercukupan. justru sebaliknya,memberi kesempatan kepada siapapun untuk bekerja memperkaya diri melalui jalan yang dibenarkan, dan hal itu tidak menjadikan dirinya berbuat *fasat*. Dengan begitu, akan mudah melaksanakan

²⁷ Intine Belajar "Hadist Arbaint tentang tolong menolong" situs resmi intinebelajar. <https://intinebelajar.blogspot.com/2016/12/hadits - Arbain- tentang - tolong -menolong .html> di akses pada 16 juli 2019 18.30

syariat Allah. Sebab tidaklah mungkin seseorang bisa menunaikan ibadah haji, membayar zakat dan sebagainya jika tanpa ditopang oleh perekonomian yang cukup.

Dari fenomena diatas, maka Islam telah mengkonsentrasikan pada pengetasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai aspek. Melepaskan manusia dari cengkraman kemiskinan dengan mempersiapkan kehidupan yang sesuai dengan keadaan dan cocok dengan kehormatan dirinya.

Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya. Di mana dengan hal itu bisa menikmati kehidupan yang dipenuhi dengan keberkahan dari langit dan bumi serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada di dalamnya dengan sebaik mungkin.

Dengan tujuan tersebut, maka salah satu upaya di tempuh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Towera adalah dengan melalui bantuan dana pemerintah yang diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan perekonomian, khususnya umat Islam.

Bantuan tersebut di harapkan dapat memberikan sumbangsih melalui pemanfaatan bantuan dana tersebut yang diterima, agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat mengangkat harkat dan martabat fakir miskin menjadi masyarakat yang mandiri tanpa ketergantungan kepada belas kasihan pihak lain.

Namun demikian, di samping adanya bantuan dari pemerintah, kita sebagai masyarakat, khususnya umat islam, harus tetap berusaha untuk mencari sumber-sumber kehidupan agar lepas dari lingkaran ekonomi lemah sebagaimana firman Allah dalam QS. AL-Mulk [67]: 15 yakni :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahannya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.²⁸

Ayat di atas begitu rinci menjelaskan bahwasannya bumi dan segala isinya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia agar dapat di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar pada akhirnya. Akan dimintai pertanggung jawaban terhadap usahanya dalam memperoleh kebutuhan hidupnya.

Hal ini mengindikasikan bahwasannya cara terbaik mensyukuri nikmat Allah ialah dengan menggunakan sesuatu itu pada hal-hal yang bermanfaat. Karenanya anggota tubuh tidak diciptakan melainkan untuk bekerja mencari rezeki.

Langkah yang di tempuh oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai perwujudan dari salah satu metode peningkatan ekonomi yang ditawarkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani dalam hal pendistribuan harta, yakni subsidi terhadap rakyat dengan cara memberikan bantuan dana kepada orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya, tidak hanya itu hal tersebut juga mencerminkan adanya tolong menolong antara orang yang mampu dengan yang kurang mampu, atau adanya pemenuhan kewajiban oleh pemerintah terhadap rakyatnya.

Dalam ekonomi Islam, motif dalam aktifitas ekonomi adalah ibadah. Motif ibadah inilah yang kemudian memengaruhi segala perilaku konsumsi, produksi dan distribusi. Secara spesifik, ada 3 motif utama dalam perilaku ekonomi Islam, yaitu mashlaha (public interest), kebutuhan (needs) dan kewajiban (obligation). Mashlahah merupakan motif yang dominan di antara ketiga motif yang ada.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya yayasan penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Qur'an*, (Semarang: PT Karya Putra. 2002), 823

Sedangkan motif kewajiban merupakan representasi entitas utama motif ekonomi, yaitu ibadah.²⁹

Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Apa bila dalam suatu masyarakat terjadi kesenjangan dalam memenuhi kebutuhannya, maka pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegahnya melalui pemerataan ekonomi di tengah masyarakat, yakni dengan cara menyalurkan atau meensubsidi masyarakat dengan harta Negara yang sudah menjadi hak bagi masyarakat itu sendiri.

²⁹ Abdul Aziz Stiawan, "*Prinsip, motif dan paradig ekonomi islam,*" dalam suara Hidayatullah, edisi 08/XVIII/Desember 2005, 31

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih judul kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkap gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data dari latar alami (*naturalisti*), dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument utama atau instrument kunci. penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan makna di balik gejala, dengan uraian deskriptif dan di bahas secara mendalam dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.³⁰

Digunakannya penelitian kualitatif di sisi lain juga karena:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti merupakan instrument kunci.
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata, sehingga tidak menekankan angka-angka.
3. Lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome.
4. Dilakukan analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna.³¹

Penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan salah satu upaya untuk menemukan teori yang dapat menunjang hasil penelitian dan hal itu dilakukan melalui pendekatan induktif. Dengan pendekatan tersebut data dikumpulkan

³⁰ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu, *pedoman penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa STAIN Datokarama palu*, (Palu:t.p, 2008), h. 17

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 22

kemudian dianalisis, diabstrasikan, sehingga muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif.³²

Hal ini dimaksudkan karena, penelitian kualitatif data ditunjang dengan menggunakan data kuantitatif, tetapi yang sering terjadi pada umumnya tidak menggunakan analisis kuantitatif bersama-sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedua pendekatan tersebut memungkinkan untuk digunakan apabila desainya dalam memanfaatkan satu paradigma sedangkan paradigma lainnya hanya sebagai pelengkap.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung keterkaitan antara hubungan penelitian dan subjek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi. Untuk dapat menemukan hasil penelitian terkadang menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, tetapi dalam beberapa hal pendekatan tersebut dapat digunakan secara terpisah.

Menurut Moleong mengutip pendapat Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai berikut:

Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Krik dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif adalah “tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Penggunaan pendekatan kualitatif dimaksudkan, karena didukung oleh data lapangan yang dianggap cukup memadai dalam menguraikan dan menganalisis hasil penelitian. Data dimaksud berkisar pada penelitian tentang “ Peran Bantuan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Ekonomi Islam”.³³

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cet.XIII; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 23

³³ *Ibid.*, 3.

B. Lokasi Penelitian

Seluruh kegiatan penelitian skripsi ini, penulis laksanakan di Desa Towera kecamatan Siniu Kabuapten Parigi Moutong yang masyarakatnya didominasi oleh berbagai macam agama, suku, dan bahasa yang beragam.

Penelitian beranggapan bahwa desa towera sangatlah ideal untuk diteliti, khususnya tentang “Peran Bantuan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Ekonomi Islam”

C. Kehadiran Peneliti

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian Kualitatif, maka kehadiran peneliti merupakan sesuatu yang penting dan mutlak pada lokasi yang dijadikan objek penelitian. Kehadiran peneliti dilakukan secara resmi dengan cara peneliti terlebih dahulu mendapatkan surat izin penelitian dari pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Dengan izin tersebut, penelitian melaporkan maksud kehadiran kepada kepala Desa Towera, yang diawali dengan menyerahkan surat izin penelitian dan diterima sebagai peneliti oleh Kepala Desa Towera, untuk melakukan penelitian terhadap pokok masalah sesuai data yang diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat bekerja sama dengan subjek atau informan yang mempunyai katan erat dengan judul yang diteliti sehingga hambatan-hambatan yang ditemui selama penelitian dapat teratasi.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan factor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya.

Jenis dan sumber data dalam penyusunan proposal skripsi ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau dari hasil penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data primer ini, penulis mengadakan observasi (pengamatan) serta wawancara.

Menurut Husen Umar, pengertian data primer adalah data yang di dapat melalui sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti wawancara.³⁴

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menggambarkan tentang “Peran Bantuan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat” di Desa Towera. Data tersebut diperoleh dari beberapa informasi, yakni orang-orang yang mempunyai kapasitas memberikan informasi/data di desa tersebut sesuai dengan permintaan peneliti melalui proses observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi yang ada hubungannya dengan materi proposal skripsi ini.

Menurut Husen Umar bahwa:

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpulan data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk di proses lebih lanjut.

³⁴ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet-I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 42

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Library research

Library research adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang penelitian ini jadikan referensi dalam penelitian ini.

2. Field research

Field research yaitu data yang diperoleh dari peneliti di lapangan dan menggunakan beberapa metode :

a. Observasi (pengamatan)

Teknik *observasi* merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang diteliti. *Observasi* adalah *study* yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dengan demikian, penulis dalam melakukan *observasi* dengan cara turun langsung ke lapangan serta mencatat semua hasil pengamatan dan penemuan yang berkaitan dengan proses penelitian. Metode *Observasi* memudahkan penulis dalam melaksanakan pengamatan di lapangan.

b. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka langsung . wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interview*) dan yang diwawancarai.³⁵

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cet.XIII;Bandung:Remaja Rosda Karya, 2000), 135

Dari pengertian di atas, maka penulis dalam mendapatkan sebuah data melakukan wawancara dengan cara bertatap muka Tanya jawab langsung.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui dokumentasi atau gambar berupa foto tentang keadaan desa atau lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah sejumlah data dan keeterangan penulis kumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Reduksi data adalah proses untuk menyusun data dalam bentuk uraian konkret dan lengkap sehingga data yang disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh. Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian.
2. Penyajian data, yaitu penyajian data yang lebih reduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.
3. Verifikasi data, yaitu suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan.

Dengan demikian maka teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melalui tiga tahap, yaitu : tahap reduksi data, mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian data yang ada disajikan sebagai tahap kedua dan ketiga dalam menyimpulkan data, yakni dengan mendeskripsikan beberapa kata-kata hasil penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pengecekan didasarkan pada sejumlah kriteria. Ada empat kriteria keabsahan data yang bisa digunakan yaitu : “Derajat kepercayaan (*credibility*) keteralihan (*transferability*), ketergantungan dan kepastan (*confirmability*).³⁶

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Derajat kepercayaan maksudnya peneliti mempertunjukkan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian pada kenyataan yang sedang diteliti.
2. Keterlhan maksudnya generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau d terapkan pada suatu konteks dalam populasi yang sama kalau dasar penemuan yang dperoleh pada sampel yang secara refresentatif mewakili populasi.
3. Ketergantungan maksudnya realibilitas atau dapat diukur, artinya penelitian berulang-ulang tetapi secara esensial hasilnya sama.
4. Kepastian maksudnya ada kesempatan antara subjek-subjek yang diteliti.

Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh maka dilakukan melauai cara triangulasi yaitu : teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Denzin, ada empat macam trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu: “Triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, triangulasi dengan penyidik dan triangulasi dengan teori”.³⁷

³⁶ Ibid 173

³⁷ Ibid, 179

Triangulasi dengan sumber, maksudnya membandingkan dan mengecek balik, derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Triangulasi dengan metode, maksudnya pengecekan derajat kepercayaan melalui beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan penyidik maksudnya memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk membantu mengurangi kekeliruan dalam pengumpulan data. Triangulasi dengan teori, maksudnya membandingkan suatu teori dengan teori lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Towera

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Peran Bantuan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Prespektf Ekonomi Islam maka dapat di paparkan sebagai berikut.

1. Kondisi geografis dan sejarah Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong

Secara geografis Desa Towera terletak di wilayah Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah. Yang dulunya Desa Towera merupakan bagian dari Kecamatan Ampibabo, sehingga pada Tahun 2007 secara sah bahwa Desa ini adalah bagian dari Kecamatan Siniu yang dimekarkan. Secara administratif termasuk wilayah pesisir yang dibatasi oleh wilayah Desa, Kecamatan dan Teluk.

Batas-Batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tolole Kec. Ampibabo.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Siniu.
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sindue.
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Teluk Tomini.

Luas wilayah Desa Towera 2.100 Ha. Terdiri dari Dusun I Lempena Luas \pm 472 Ha, Dusun II Matana Luas \pm 39 Ha, Dusun III Sinaba Luas \pm 67 Ha, Dusun IV Boya Luas \pm 1.039 Ha dan Dusun V Silemata Luas \pm 483 Ha.

Lahan terbagi dalam beberapa peruntukan dapat di kelompokkan sebagai berikut :
Lahan Perumahan/pemukiman Penduduk (\pm 120) Ha, Lahan perkantoran (\pm 0,5)

Ha, Lahan Perkebunan (± 750) Ha, Lahan ladang (± 10) Ha, Lahan Persawahan (± 75) Ha, Lahan lain-lain (± 9) Ha dan Lahan Hutan rakyat (± 150) Ha serta Lahan Hutan Rimba ($\pm 985,5$) Ha. Desa Towera mempunyai Curah hujan (1500-2000) MM/Thn dan Suhu Udara (20-25) °C.

Orbitas Desa Towera sebagai berikut :

- a. Jarak dari Desa Towera Ke Ibukota Kecamatan = 3 KM.
- b. Jarak dari Desa Towera Ke Ibukota Kabupaten = 32 KM.
- c. Jarak dari Desa Towera Ke Ibukota Propinsi = 89 KM.

Terdiri dari 5 Dusun, 12 (RT) Rukun Tetangga.

Tabel 1. Jumlah Dusun dan Rukun Tetangga (RT)

JUMLAH DUSUN	JUMLAH RUKUN TETANGGA
Dusun I Lempena	2 Rukun Tetangga.
Dusun II Matana	2 Rukun Tetangga.
Dusun III Sinaba	3 Rukun Tetangga.
Dusun IV Boya	3 Rukun Tetangga.
Dusun V Silemata	2 Rukun Tetangga.

Sumber Data: Desa Towera Kecamatan Siniu

Kampung/Desa TOVERA merupakan pemekaran dari kampung Tolole di bagian Utara sungai Tovera dan kampung Siniu di bagian Selatan sungai Tovera masing-masing kampong di ambil wilayahnya sebagian. Untuk Kampung Tolole di masukan wilayahnya, mulai dari sungai Tovera sampai karopua (Bintu) dan kampung Siniu di masukan wilayah sebelah Selatan, mulai dari sungai Tovera sampai Kabonena (Siloyangi) yang menjadi wilayah Desa Tovera sekarang.

Sebelumnya yang menjadi batas antara kampung Tolole dan kampung Siniu adalah Sungai Tovera. Dari masigi/patongko (wilayah Mesjid Nur sekarang)- Parigi, atas perintah Raja Parigi yaitu *Hanusu (Magau Dusu)*

Tahun 1898 s/d 1929 magau ke 15 kerajaan Parigi, kepada Mpogo (Manteuli) mendirikan Pemukiman yang disebut Boya.

Boya yang berarti tempat bermukimnya sekelompok manusia/orang. kemudian Boya Manteuli di ikuti orang banyak yaitu sebagian masyarakat Desa Tolole dan masyarakat Desa Siniu, yang menjadi anggota masyarakat Manteuli, karena kampung Tovera tersebut berada diperbatasan antara kampung Tolole di Utara dan Kampung Siniu di Selatan, yang menjadi batas kedua kampung tersebut adalah Sungai Tovera. Pada sungai Tovera dipasang Tanda sebagai Batas yang disebut POVERA. Povera biasanya di beri tanda-tanda seperti kayu, daun kelapa yang sengaja di dirikan untuk menentukan batas wilayah kampung.

Dari kata Povera menjadi Tovera. Nama Tovera di ambil dari bahasa Kaili sub etnis "Rai" yang berasal dari dua suku kata yakni To berarti Orang dan Vera berarti Tanda dalam artian Batas. Tovera yang akhirnya menjadi nama Kampung yang berarti harafiahnya "*Orang-orang yang bermukim di perbatasan*" dengan di pimpin Kepala Kampung yang pertama bernama *Mahajiri* dan Kepala Kampung Kedua bernama *Biraganti*. Kedua Kepala Kampung tersebut merupakan anak dari *Manteuli*, dimana Beliau merupakan leluhur sebagian besar masyarakat kampung /Desa Tovera.

2. Visi dan Misi Desa Towera

Visi dan Misi Desa Towera Mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Profesional Pada Tahun 2025.

Misi Desa Towera

- a. Mewujudkan pemerintah yang bersih, adil, jujur dan berwibawa.
- b. Mewujudkan pemerintah yang mandiri, transparan dan professional

- c. Meningkatkan pengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat
- d. Mendorong dan membina masyarakat dalam meningkatkan masalah ekonomi pedesaan dari semua aspek
- e. Membangun sarana/ prasarana pendidikan formal dan non formal
- f. Memberantas buta aksara dan mendorong masyarakat untuk ikut program pendidikan belajar 9 tahun
- g. Menciptakan kebersihan, ketertiban dan stabilitas keamanan dalam Desa
- h. Membina dan melestarikan adat istiadat Desa
- i. Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
- j. Melakukan terobosan dalam pembangunan fisik dan non fisik masyarakat serta mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam Desa
- k. Memberikan peluang kepada investor untuk menanamkan modalnya didalam Desa sehingga dapat bereluang menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat
- l. Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga

Tabel 2. Sejarah Pemerintahan Desa Towera Tahu 1923-2019

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Tahun (1923-1929)	Mahajiri	Info : Dari berbagai sumber
2	Tahun (1929-1931)	Biraganti	Info : Dari berbagai sumber
3	Tahun (1931-1934)	Malapa	Info : Dari berbagai sumber
4	Tahun (1934-1937)	Lantiongu	Info : Dari berbagai sumber
5	Tahun (1937-1940)	Ranggesusa	Info : Dari berbagai sumber
6	Tahun (1940-1944)	Kiya Lembah	Info : Dari berbagai sumber

7	Tahun (1944-1947)	Hasan Lamuntu	Info : Dari berbagai sumber
8	Tahun (1947-1949)	Andi Atjo Lembah	Info : Dari berbagai sumber
9	Tahun (1949-1953)	Maduana Labudi	Info : Dari berbagai sumber
10	Tahun (1953-1957)	Kiya Lembah	Info : Dari berbagai sumber
11	Tahun (1957-1961)	Baharullah Labudi	Info : Dari berbagai sumber
12	Tahun (1961-1992)	Lamuhidin Lantiongu	Info : Dari berbagai sumber
13	Tahun (1992-1994)	Andi Azis	Pjs. SK CAMAT
14	Tahun (1994-1996)	Nurdin Tjambaru	Pjs. SK CAMAT
15	Tahun (1996-1999)	Moh. Nur Moniaga	Berhenti Menjabat
16	Tahun (1999-2001)	Aman Rantesigi	Melanjutkan
17	Tahun (2001-2006)	Darsin Larekeng, SE	1 Periode
18	Tahun (2006-2012)	Ma'ruf Amin Ranggsusah	1 Periode
19	Tahun (2012-2012)	Moh. Adil Rantesigi	Pjs. SK BUPATI
20	Tahun (2012-2018)	Darsin Larekeng, SE	1 periode
21	Tahun (2018-2019)	Ramlun	Pjs. SK. Camat
22	Tahun (2019-2024)	Moh Rafi'in Labaso	Sementara menjabat

SumberData: Desa Towera Kecamatan Siniu

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Penduduk Desa Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong berjumlah 1998 jiwa yang terdiri dari 490 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut dapat di rinci menurut jenis kelaminnya sebagai terlihat dalam table berikut:

Tabel 3. Kondisi Sosial Budaya Desa (Potensi Sumber Daya Manusia) Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1060 jiwa
2	Perempuan	938 jiwa

	Jumlah	1998 jiwa
--	--------	-----------

SumberData: Desa Towera Kecamatan Siniu

Dari table diatas, dapat diketahui bahwa Desa Towera Kecamatan Siniu mempunyai peningkatan jumlah penduduk setiap tahunya, baik itu jumlah penduduk laki-laki ataupun jumlah penduduk perempuan. Dari peningkatan otomatis jumlah Kepala Keluarga juga bertambah. Rumah tangga juga bertambah dikarenakan semakin bertambahnya bangunan rumah. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada perempuan. Adapun mata pencarian penduduk Desa Towera mayoritas sebagai peetani ada juga sebagai peternak dan buruh Tani. Ini disebabkan daerah atau wilayah Desa Towera merupakan pertanian dan perkebunan yang sangat luas berada di Kecamatan Siniu. Adapun mata pencarian yang lain, itu hanya merupakan mata pencarian sampingan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis yang terletak didekat gunung, hal ini yang menunjang aktifitas ekonomi yang lain. Untuk lebih jelasnya teentang mata pencarian penduduk Desa Towera, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Towera Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	357
2	Buruh Tani	45
3	Buruh Migran Perempuan	2
4	Buruh Migran laki-laki	0
5	Pegawai Negeri Sipil	21
6	Pengrajin	5
7	Pedagang keliling	10
8	Peternak	65
9	Nelayan	58

10	Montir	4
11	Bidan	2
12	Pembantu Rumah Tangga	4
13	Polri/TNI	1
14	Pensiunan	4
15	Pengusaha	7
16	Dukun Terlatih	1
17	Jasa (Penjahit)	4
18	Seniman	0
19	Karyawan Swasta	40
20	Lainnya	90
	Jumlah	720

SumberData: Desa Towera Kecamatan Siniu

Masyarakat Desa Towera tingkat pendidikannya sangat dipentingkan maka sudah jelas bahwa warga masyarakat yang dahuu belum mengerti tentang pentingnya pendidikan, ini dilihat semakin tingginya jumlah warga yang hanya tamat sekolah SD/ sederajat. Program pemerintah wajib belajar 9 (Sembilan) tahun baru dicanangkan, maka dapat dilihat juga terjadinya perkembangan sehingga usia yang masi sekolah juga cukup banyak. Mayoritas penduduk terbebas dari buta aksara, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Towera Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Masuk Sekolah	72
2	Sedang TK	82
3	Tidak Pernah Sekolah	54
4	Yang Sedang Sekolah	472

5	Pernah SD Tapi Tidak Tamat	44
6	Tamat SD/Sederajat	589
7	Tidak Tamat SLTP	40
8	Tidak Tamat SLTA	15
9	Tamat SLTP/Sederajat	255
10	Tamat SLTA/Sederajat	255
11	Tamat D.2	16
12	Tamat D.3	5
13	Tamat S.1	55
	Jumlah	1954

SumberData: Desa Towera Kecamatan Siniu

Sementara itu, masyarakat Desa Towera Kecamatan Siniu Dihuni oleh tiga agama untuk lebih jelasnya tentang keadaan agama masyarakat Desa Towera dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 6. Keberagaman Agama Yang Ada Di Desa Towera Tahun 2019

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1974
2	Kristen	4
3	Hindu	20

Berdasarkan data diatas dapat diketahui betapa umat beragama Islam menduduki urutan terbanyak jumlah penganutnya, yang emudian disusul agama Hindu dan selanjutnya Kristen.³⁸

³⁸ Sumber Data, *Laporan Dokumen RP JMDes Desa Towera Kecamatan Siniu*, Tanggal 26 Sepetember 2019

B. Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Melalui Bantuan Dana Desa

Berbicara mengenai upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan peran pemerintah desa sendiri. Menyinggung perihal peran dari suatu kinerja, hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya kualitas. Kualitas dari tugas pemerintah desa yang dimaksud di sini adalah sejauh mana pemerintah desa mampu menyelenggarakan aktifitas-aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat. Aktifitas pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan perekonomian serta kepentingan rakyat desa secara umum. Selain itu, segala aktifitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat secara signifikan di segala segi kehidupannya.

Membahas mengenai bagaimana dan seperti apa aktifitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka hal ini tidak akan terlepas dari tahapan-tahapan dalam bagaimana pemerintah desa melaksanakan suatu program, khususnya dalam hal ini adalah pemberdayaan melalui dana desa.

Menurut Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Towera yaitu Bapak Wisnu menyatakan bahwa tahapan atau proses pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa adalah melalui program-program kerja desa, yang mekanismenya dimulai dengan:

Pertama, pemerintah desa mengadakan musyawarah rencana kerja pembangunan desa yang dihadiri setiap elemen masyarakat di kedusunan, yang

tujuannya adalah untuk membicarakan dan menampung aspirasi masyarakat, program apa saja yang diinginkan oleh masyarakat, serta yang harus direalisasikan oleh pemereintah desa dalam satu tahun anggaran atau satu periode pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, dilakukan sebelum awal tahun anggaran, yang didalamnya melibatkan ketua RT, serta tokoh-tokoh masyarakat. Di Desa Towera sendiri terdapat 5 (lima) dusunan.

Kedua, setelah semua hasil musyawarah rencana kegiatan pembangunan tertampung, maka dilanjutkan dengan MUSDES (Musyawarah Desa), yang dihadiri oleh masyaraat, yang tujuannya adalah untuk menentukan skala prioritas program apa saja yang harus didahulukan di lapangan.³⁹

Pelaksanaan MUSDES ini dimaksudkan untuk menindak lanjuti segala aspirasi yang diajukan pada saat musyawarah pertama, serta untuk menentukan, menyusun skala prioritas program usulan, yang akan dilaksanakan ataupun didanai menjadi program desa. Prioritas program yang telah ditentukan, selanjutnya akan dituangkan ataupun akan masuk dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Seperti yang disebutkan sebelumnya, MUSDES adalah untuk menentukan program-program berdasarkan usulan yang telah diajukan, yang pada selanjutnya disebutkan dengan skala prioritas. Misalkan pembahasan aspirasi yang diajukan oleh yakni perbaikan jalan dan pembuatan dreinase. Prioritas program yang telah ditentukan, selanjutnya akan dituangkan ataupun akan masuk dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).⁴⁰

³⁹ Hasil Wawancara dengan Kaur Kesra Desa Towera Bapak Wisnu, pada 28 September 2019

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Kaur Kesra Desa Towera Bapak Wisnu, pada 28 September 2019

Setidaknya dua hal tersebut yang menjadi tahapan sebelum pelaksanaan program dilakukan kepada masyarakat. Ke dua tahapan di atas akan selalu dilakukan oleh Pemerintah Desa Towera dalam upayanya melaksanakan segala bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan ataupun kegiatan pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebagai suatu bentuk strategi pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan yang lainnya.

Secara umum, fungsi dari pemerintahan setidaknya mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Pemerintah desa sebagai wadah dalam menampung dan merealisasikan segala aspirasi masyarakat di desa, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan. Kemudian kewajiban dari pemerintah desa itu sendiri adalah menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut.

Setidaknya hal serupapun dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Towera, yang memang diharapkan mampu meningkatkan segala bentuk pemberdayaan masyarakat melalui bantuan dana desa yaitu yang bersumber dari :

Tabel . 7 Sumber Pendapatan Dana Desa dari Tahun 2015-2019

TAHUN	SUMBER DANA	DANA
2015	Dana Desa	Rp. 271.427.612.-
	Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 3.855.011.-
	Alokasi Dana Desa	Rp. 266.495.870.-
	TOTAL DANA DESA	Rp.541.778.493.-
	Dana Desa dipergunakan untuk Bidang	
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar	Rp. 194.780.881.-
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 222.035.000.-
	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Rp. 62.997.612.-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 61.965.000.-	

2016	Dana Desa	Rp.608.657.262.-
	Hasil pajak dan Retribusi daerah	Rp. 4.271.903.-
	Alokasi Dana Desa	Rp.276.248.539.-
	TOTAL DANA DESA	Rp.889.177.704.-
	Dana Desa dipergunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.204.240.442.-
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.544.093762.-
	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 60.930.000.- Rp.79.913.500.-
2017	Dana Desa	Rp.774.966.000.-
	Alokasi Dana Desa	Rp.270.716.101.-
	Hasil Pajak Hasil Retribusi Daerah	Rp.5.594.579.-
	TOTAL DANA DESA	Rp.1.051.276.680.-
	Dana Desa dipergunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.220.870.680 Rp.636.783,000.-
	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebesar	Rp. 55.440,000.-
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 138.183,000.-
2018	Dana Desa	Rp.743.353.000.-
	Alokasi Dana Desa	Rp.284.627.511.-
	Hasil Pajak	Rp.4.815.522.-
	Hasil Retribusi Daerah	Rp.1.118.608.-
	TOTAL DANA DESA	Rp.1.033.914,641.-
	Dana Desa dipergunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.234.801,641.- Rp.509.000,000.-
	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa sebesar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 55.760,000.- Rp.234.353,000.-
	Dana Desa	Rp.857.185.000.-
	Bagi hasil Pajak	Rp. 5.205.266.-

2019	alokasi dana desa	Rp.269.190.683.-
	bagi hasil retribusi daerah	Rp. 1.868.693.-
	TOTAL DANA DESA	Rp.1.133.449.642.-
	Dana Desa dipergunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.220.474,642.-
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.621.871,000.-
	Pembinaan Masyarakat Desa sebesar	Rp. 55.790,000.-
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 229.314,000.-
	Bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat	Rp. 6.000,000

Dapat kita lihat diatas bahwa dana desa tersebut cukup jelas sumber pendapatannya dimana dana tersebut digunakan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan didesa.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pemeritah Desa Towera dalam meningkatkan kualitas, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari tahun ketahun sejak adanya dana desa yaitu sebagai berikut :

Tabel . 8 Bidang Pembangunan dan pemberdayaan melalui Dana Desa dari Tahun 2015-2019

TAHUN	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	DANA DESA
2015	A. Pembangunan Infrastruktur	
	1. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Desa antar Pemukiman Ke Wilayah Pertanian (rehabilitasi jalan).	Rp.37.500.000.-
	2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa (pembukaan jalan baru)	Rp.41.290.000.-

3. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa (Pemasangan Atap dan Plesteran Dinding.)	Rp.42.255.000.-
4. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier Desa (Pemb. Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani)	Rp.46.520.000.-
5. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa.	Rp.19.415.000.-
6. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Poskesdes dan polindes (pembangunan pagar dan penyediaan perlengkapan lainnya.	Rp. 27.330.000-
7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Milik Desa (penanaman kelapa Bangkok)	Rp.7.725.000.-
JUMLAH	Rp.222.035.000.
B. Pemberdayaan	
1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Sosialisasi/ Penyuluhan tentang Perilaku Hidup)	Rp. 6.745.000
2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Pelatihan Tentang Kemandirian POKMAS)	Rp 4.990.000
3. Kelompok Perempuan (Pelatihan tentang Tatacara Pembuatan dan Pengolahan Minyak Kelapa Non Kolesterol)	Rp. 19.245.000

	4. Kelompok Tani (Pelatihan tentang Tatacara Penanggulangan dan Pemberantasan Hama pada Tanaman Padi)	Rp.6.745.000
	5. Kelompok masyarakat miskin (Pemberian Bantuan Sembako kepada Janda Miskin)	Rp.7.500.000
	6. Kelompok Nelayan (Pelatihan tentang Tatacara Budidaya Ikan Air Tawar)	Rp.6.745.000
	7. Kelompok Pemuda dan Olahraga (Sosialisasi tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Minuman Keras dan Narkoba)	Rp.9.995.000
	JUMLAH	Rp. 61.965.000
2016	A. Pembangunan Infrastruktur	
	1. Pengembangan Poskesdes dan Polindes serta Pengadaan Peralatan Poskesdes & Perlengkapan lainnya.	Rp. 6.750.000
	2. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa	Rp.10.123.762
	3. Pengelolaan & Pembinaan Posyandu Melalui Gizi Balita, Pemeriksaan Bumil, Penyuluhan Kesehatan, Gerakan Hidup bersih, Penimbangan Bayi & Gerakan Sehat	Rp.3.600.000
	4. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin bagi Balita Anak-anak dan Lansia	Rp. 7.200.000
	5. Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pembinaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Rp 15.670.000

6. Pembangunan,Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kantor/Balai Desa.	RP. 15.350.000
7. Pembangunan & Pemeliharaan Jalan & Jembatan Desa dan Pembangunan Plat Dueker Desa.	Rp. 50.000.000
8. Pembangunan, Pemanfaatan & Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa	Rp. 90.000.000
9. Pembangunan, Pemanfaatan & Pemeliharaan Polindes, Poskesdes dan Posyandu (Pembangunan Gedung Poskesdes/Polindes.)	Rp. 190.000.000
10. Pembangunan, Pengelolaan, Pemanfaatan & Pemeliharaan Air Bersih dan dan Air Minum berskala	Rp. 16.800.000
11. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa	Rp. 75.000.000
12. Pembangunan, Pemanfaatan & Pemeliharaan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (pembangunan pagar beton gedung paud)	Rp. 55.000.000
13. Pembukaan lahan Pertanian	Rp. 8.600.000
JUMLAH	Rp. 544.093.762
B. Pemberdayaan	
1. Pendidikan,Pelatihan/Kursus, Bimtek dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bimbingan Teknis dan Studi Banding tentang BUMDES	Rp.30.000.000

	2. Pemberian bantuan mesin ketinting kepada kelompok nelayan	Rp.10.000.000
	3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Sosialisasi tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Rp. 7.709.000
	4. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan Pelatihan ttg Tatacara PembuatanPiring Lidi (Ingko) dana yang di alokasikan dibidang ini sebesar	Rp. 8.186.500
	5. Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan Sosialisasi Perundang undangan tentang SDM terhadap Nelayan	Rp. 7.709.000
	6. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda dan Olahraga (Sosialisasi tentang Pencegahan Kenakalan Remaja)	Rp. 16.309.000
	JUMLAH	Rp.79.913.500
2017	A. Pembangunan Infrastruktur	
	1. Pembangunan Drainase Desa wil Dusun II Matana & IV Boya (Uk. 200 Meter)	Rp. 79.848,000.-
	2. Pembangunan Jembatan Desa wil. Dusun V Silemata (Uk. 6 x 4 Meter)	Rp.120.214,000.-
	3. Pembangunan Plat Decker Desa wil Dusun II Matana & IV Boya (Uk. 4 x 1 Meter)	Rp. 29.553,000.-
	4. Pembangunan POSYANDU Desa wil Dusun III Sinaba (Uk. 8 x 6 Meter)	Rp.143.295,000.

5. Pembangunan Pagar Tembok Gedung PAUD wil Dusun IV Boya (Uk. 135 Meter)	Rp.103.873,000
6. Pengadaan Mobileur Taman Belajar Agama Islam wil Dusun I Lempena	Rp. 10.800,000.-
7. Pembangunan Sanggar Tani wil Dusun IV Boya (Uk. 7 x 5 Meter)	Rp. 98.092,000.-
8. Pembangunan Irigasi Desa wil Dusun IV Boya (Uk. 100 Meter)	Rp. 51.108,000.-
JUMLAH	Rp. 636.783.000
B. Pemberdayaan	
1. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp. 15.069,000
2. Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi bagi Balita	Rp. 7.200,000
3. Pengadaan Peralatan Poskesdes & P'lengkapan lainnya	Rp. 8.750,000
4. Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Ibu Hamil & Menyusui	Rp. 3.600,000
5. Pelayanan Kesehatan Pengobatan untuk Lansia	Rp. 2.255,000
6. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 47.850,000
7. Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan	Rp 14.150,000
8. Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil	Rp. 14.600,000

	9. Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa	Rp. 4.824,000
	10. Pengem. Laporan Keuangan & Aset Desa yg terbuka untuk Publik	Rp. 3.700,000
	11. Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa & Lembaga Adat,	Rp. 7.185,000
	12. Pelatihan Kerja dan Ketrampilan bagi Masyarakat Desa	Rp. 9.000.000
	JUMLAH	Rp. 138.183,000
2018	A. Pembangunan Infrastruktur	
	1. Pembangunan Drainase Desa wil Dusun IV Boya & Dusun V Silemata (Uk. 300 Meter)	Rp. 98.200,000.-
	2. Pemeliharaan Jalan Pemukiman Desa wil. Dusun I Lempena (Uk. 300 Meter)	Rp. 36.519,000.-
	3. Pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa wil Dusun III Sinaba & IV Boya (Uk. 700 Meter)	Rp. 45.945,500.-
	4. Pembangunan Jambanisasi Warga Miskin wil Desa Towera (Uk. 12 Unit)	Rp.162.099,000.
	5. Pembangunan POSYANDU Desa wil Dusun I Lempena (Uk. 6 x 4 Meter)	Rp. 45.304,500.-
	6. Pengadaan Wahana Permainan PAUD wil Dusun II Matana & IV Boya (Uk. 7 Unit)	Rp.15.000,000.-
	7. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa wil Dusun III Sinaba (Uk. 150 Meter)	Rp. 66.932,000.-
	8. Pengadaan Mesin Jahit untuk Kelompok Warga wil Desa Towera (Uk. 3 Kelompok)	Rp. 39.000.000.-

	JUMLAH	Rp. 509.000.000
	B. Pemberdayaan	
	1. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Insentif Kader Kesehatan)	Rp. 17.823,000
	2. Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi bagi Balita (PMS Balita)	Rp. 7.200,000
	3. Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Ibu Hamil & Menyusui (Keg. Sweping)	Rp. 4.680,000
	4. Pelayanan Kesehatan Pengobatan untuk Lansia/Pengadaan Obat-Obatan LANSIA	Rp. 3.000,000
	5. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan & Kebudayaan (PAUD, TPA & Olahraga)	Rp. 46.410,000
	6. Pengelolaan produksi usaha pertanian pengadaan pupuk Petani sawah	Rp. 30.000,000
	7. Pengolahan dan Pengadaan Bibit Durian Montong	Rp. 87.500,000
	8. Pengelolaan Hutan desa, dan Hutan Adat	Rp. 8.000,000
	9. Kegiatan Pendataan potensi dan aset desa serta Penyusunan Profil Desa	Rp. 6.640,000
	10. Pengem. Laporan Keuangan & Aset Desa yg terbuka untuk Publik	Rp. 4.650,000
	11. Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp. 3.450,000
	JUMLAH	Rp. 234.353,000

2019	A. Pembangunan Infrastruktur	
	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Non Formal Milik Desa.	Rp. 42.630,000.-
	2. Rehabilitasi/Peningkatan dan Pengadaan Sarana/Prasarana APE PAUD/TK	Rp. 27.220,000.-
	3. Penyelenggaraan Poskesdes/Polindes Mlk Desa/Penyediaan Obat-Obatan.	Rp. 4.690,000.-
	4. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu Balita & Lansia).	Rp. 39.620,000.-
	5. Penyelenggaraan Lomba-lomba Bidang Kesehatan Berskala Lokal Desa	Rp. 1.100,000.-
	6. Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Uk. 250 Meter)	Rp. 53.308,000.-
	7. Pembangunan Drainase Jalan Desa 2 Type (Uk. 400 Meter)	Rp.141.770,000
	8. Pengadaan Ketinting untuk Peningkatan Usaha Nelayan (Uk. 7 Unit)	Rp.45.500,000.-
	9. Rehabilitasi & Peningkatan Sumber Air Bersih/Gantungan Pipa (Uk. 100 Meter)	Rp. 76.223,000.-
	10. Pembangunan Jambanisasi Warga Kurang Mampu (Miskin) (Uk. 12 Unit)	Rp.185.040,000.-
	11. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa/Pembuatan Baliho APBDES	Rp.4.770,000.-
	JUMLAH	Rp.621.871.00

B. Pemberdayaan		
1. Penguatan Ketahanan Pangan tingkat Desa/Pengadaan Durian Montong.		Rp. 40.000,000
2. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.(Uk.151Meter)		Rp. 67.914,000
3. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		Rp. 10.750,000
4. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		Rp. 21.500,000
5. Peningkatan Kapasitas BPD		Rp. 10.750,000
6. Pengembangan SaPras Usaha Micro, Kecil, Menengah & Koperasi (Perbengkelan)		Rp. 8.500,000
7. Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Kelompok Usaha Perempuan)		Rp. 69.900,000
JUMLAH		Rp. 229.314,000

Dapat dilihat dari data diatas setiap tahunnya ada bidang kegiatan yang berbeda dan ada pula yang dilanjutkan setiap tahunnya, walaupun begitu cukup jelas tergambar bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah Desa Towera sudah mengalami peningkatan. Seperti dalam bidang yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Drainase

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat vital dan penting untuk mempercepat proses pembangunan berskala nasional. Tidak hanya itu, dengan berjalannya pembangunan infrastruktur, akan sangat menunjang bagi masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya, serta dengan pembangunan infrastruktur ini akan berpengaruh pula dalam berbagai sektor.

Kondisi pembangunan di Desa Towera saat ini memang belumlah berjalan secara pesat, hal ini salah satunya dapat dilihat dari perspektif pembangunan desa yang dapat dikatakan belumlah sepenuhnya memadai, salah satu contohnya yaitu pembangunan infrastruktur dreinase . Sesuai dengan salah satu misi dari Desa Towera yakni mengoptimalkan sarana dan prasarana desa, maka dalam proses optimalisasi ini diawali dengan pembangunan yang salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.

Berangkat dari hal ini, maka Pemerintah Desa Towera melakukan suatu proses perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari Program Dana Desa (DD). Pemerintah Desa Towera dalam pemanfaatan dana desanya, secara umum memang diprioritaskan dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur.

Dana desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa Towera dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat desa, lebih diarahkan pada perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, yang meliputi perbaikan atau pembangunan sarana publik dalam skala kecil seperti pengerasan jalan, dan perbaikan irigasi, pembuatan dreinase jalan dan lainnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Towera telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pembangunan dreinase dan pengerasan jalan desa dan pembangunan infrastruktur lainnya dalam hal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Desa setiap tahunnya .

Melihat pembangunan dari pemerintah desa yang di dorong dengan adanya program dana desa dari tahun 2015 sampai 2019, terdapat tanggapan dari masyarakat Towera sendiri. Dalam wawancara dengan Bapak Dahlan , dikatakan bahwa:

“Sekarang memang pemerintah desa telah terlihat pembangunannya, seperti ada pembangunan dreinase, jalan dan yang lainnya juga. Hal ini

bagus untuk kita semua, biar desa kita terlihat bagus, dan lebih maju juga. Yang paling penting pembangunannya terus berjalan.”⁴¹

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Kamsil dalam wawancara:

“Bagus sekarang perbaikan jalan dan jembatan sudah dilakukan, biar lebih memudahkan juga untuk masyarakat. Dan sekarang itu, pemerintah Desa Towera cukup bagus dalam masalah pembangunan lebih terasa”.⁴²

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Towera, pastinya berdasarkan apa yang menjadi usulan dari setiap masyarakat, hal ini dimaksud agar pembangunan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Towera benar-benar dapat terasa manfaatnya.

2. Pembangunan Jambanisasi dan Pengadaan/peningkatan Air Bersih

Dalam kegiatan ini pemerintah mengalokasikan dana desa pada tahun 2018 sejumlah Rp.162.099.000.- untuk pembangunan Jambanisasi sebanyak 12 unit dan pada tahun 2019 pemerinntah mengalokasikan kembali dana desa untuk pembuatan jambanisasi sebesar Rp. 185.040.000.- untuk 12 unit jambanisasi dalam pembangunan jambanisasi ini bagi masyarakat yang kurang mampu Pemerintah Desa mengharapkan masyarakat dapat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

Selain itu pemerintah Desa Towera melakukan peningkatan air bersih bagi masyarakat, pemerintah mengalokasikan dana Desa pada tahun 2015 sebesar RP. 19.415.000 yang mana dana tersebut dipergunakan untuk membeli peralatan atau perlengkapan yang diperlukan dan biaya upah kerja, pada tahun 2016 dana yang di alokasikan untuk uk 700 meter sebesar RP. 16.800.000.- yang mana dana tersebut di pergunakan untuk membeli jaringan Air, pengadaan bahan dan asesoris pipa serta upah pekerja. Dan pada tahun 2019 dana yang di alokasikan untuk uk

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Dahlan Selaku Masyarakat Desa Towera, pada 29 September 2019

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Kamsil Selaku Masyarakat Desa Sinar Palembang, pada a 29 September 2019

100 meter sebesar Rp. 76.223.000.- yang mana dana dipergunakan untuk upah tenaga kerja, honorer dan belanja bahan baku. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu seperti yang di katakana oleh Ibu Mawarni dalam wawancaranya:

”kami bersyukur bahwa dengan adanya dana desa tersebut pemerintah desa dapat menyediakan air bersi bagi kami masyarakat desa, sehingga kami tidak perlu lagi untuk pergi jau-jau mencari air bersih, kami merasa sangat terbantu dengan adanya dana desa tersebut, karena selama ini kami kesusahan untuk persedian air bersih”.

3. Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) dan Pokesdes

Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992) dan sekaligus sebagai investasi, sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa, agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.⁴³ Hal ini perlu dilakukan, karena kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk pihak swasta.⁴⁴

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.⁴⁵

⁴³ Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. (Jakarta, 2016.)
h.1

⁴⁴ Ibid h.1

⁴⁵ Ibid h.2

Maka dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Desa Towera menyelenggarakan program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Pembuatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) menjadi program pemberdayaan dalam bidang kesehatan. Selain itu pengalokasian sarana kesehatan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan kesehatan ini.

Pemerintah Desa Towera mengalokasikan dana dari program dana desa yang mana di gunakan untuk kepentingan yang bersangkutan dengan hal tersebut seperti penyediaan peralatan dan peerengkapan yang dibutuhkan pada Saat posyandu, dan melakukan pelatihan pada kader kader posyandu tersebut. Pada tahun 2019 untuk mengadakan bangunan dan prasarana lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kenyamanan pada kegiatan pelayanan kesehatan bagi bayi, balita, ataupun ibu hamil. Hal ini diharapkan akan memberikan suatu manfaat dalam hal kesehatan masyarakat Desa Towera.

Dalam wawancara dengan Bapak Moh. Adil Rantesigi menyatakan bahwa:

“Dalam pemberdayaan bidang kesehatan, kami membangun Posyandu Itu salah satu pemberdayaan dalam bidang kesehatan melalui dana desa. Selain itu juga, dalam bidang kesehatan kami memberdayakan para kader-kader Posyandu yang bersinergi dengan bidan desa, Alhamdulillah pelaksanaan Posyandu bisa terlaksana di setiap lingkungan dengan jadwal yang sudah diatur. Kemudian kami juga mengalokasikan sarana-sarana penunjang kesehatannya, seperti timbangan bayi, alat cek ibu hamil dan lainnya”.⁴⁶

Selain itu, pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) serta dibarengi dengan pemberdayaan para kader-kader Posyandu, Pemerintah Desa Towera sendiri berharap masyarakat Desa Towera terutama para ibu hamil dan balita, lansia mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, yang pada hakikatnya sangatlah penting mereka dapatkan.

⁴⁶ Wawancara Dengan Sekdes Desa Towera Bapak Moh. Adil Rantesigi, pada 1 Oktober 2019

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak tersebut cukup cekap dalam melaksanakan tugasnya dan tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Masyarakat Desa Towera jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, bahkan banyak juga yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih dari 60% masyarakat Desa Towera telah mencapai minimal 9 tahun belajar atau telah mencapai pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP).

Dalam perhatian pemerintah dan masyarakat membentuk program pembinaan serta pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang ditujukan pada masyarakat agar anak-anak pada usia dini dapat terdidik, disiplin dan memiliki mental yang baik. Dalam pemberdayaan ini pemerintah desa mengalokasikan untuk hal ini agar meningkatkan pemberdayaan. kesadaran masyarakat dalam menyekolahkan anak sejak dini Di Desa Towera cukup baik dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang menyekolahkan anak-anak di PAUD Desa Towera.

4. Pengembangan Keolahragaan

Dalam kegiatan ini pemerintah mengalokasikan dana desa pada tahun 2015 sejumlah Rp. 9.995.000 dana tersebut di alokasikan pada kegiatan seminar, pembeian bola kaki, bola volli, takraw, net volli, net takraw dan papan catur masing masing 2 buah. Pada tahun 2016 pemerintah mengalokasikan dana Rp. 16.309.000 yang di gunakan untuk kegiatan seminar, alat olah raga (baju 1 set, bola kaki 4 buah dan meja teniis lipat 1). Pada tahun 2017 dana yang dialokasikan sejumlah Rp.14.200.000. yang di pergunakan untuk insentif pelati 1 orang, baju bola 2 set dan bola kaki 12 biji . pada tahun 2018 dana yang di alokasikan sebesar Rp. 13.420.000 yang mana di pergunakan untuk insentif pelati 2 orang

,baju kostum latihan 2 lusin,bola kaki 6 buah, baju kostum bola 1 set dan bola voli 4 buah. dalam pengembangan keolahragaan masyarakat Desa Towera Pemerintah Desa Mengajak Masyarakat khususnya pemuda untuk aktif dalam keolahragaan, hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa bisa berkumpul dan dapat menjalin komunikasi dengan baik antar sesama masyarakat, selain itu perhatian pemerintah pada kesehatan masyarakat.

5. Kegiatan Pembelajaran Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Towera merupakan Pemeluk agama Islam dan sebagiannya lagi adalah memeluk agama Hindu dan Kristen. Pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa juga di alokasikan untuk kegiatan di bidang keagamaan seperti dalam pembinaan TPA (Taman Pendidik Al-Qur'an) dan menyediakan keperluan yang dibutuhkan. Dalam hal ini pemerintah juga menyalurkan dana desa untuk insentif pengajar TPA dan untuk Keperluan yang di butuhkan dalam kegiatan pembelajaran.

Dalam wawancara dengan Ibu Nur selaku pengajar di TPA ((Taman Pendidik Al-Qur'an)) Desa Towera, Beliau Menyampaikan :

“Alhamdulillah dengan adanya program pemerintah desa yang dibantu dengan adanya dana desa kegiatan keagamaan Desa Towera dapat berjalan lebih Maksimal, dari tahun ketahun ini sangat membantu untuk kami untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak dalam bidang ini.”⁴⁷

6. Pengadaan Bibit Pohon Duria Montong

Pemerintah Desa Towera juga memberikan bantuan pengadaan bibit pohon durian montong pada tahun 2018 dana yang di alokasikan untuk pembelian 4375 pohon yaitu sebesar Rp. 47.500.000, untuk 5 kelompok yang terdiri dari 20 orang dan pada tahun 2019 dana yang di alokasikan sebesar Rp. 40.000.000 untuk pembelian 2000 pohon bibit durian montong . dengan adanya bantuan ini di

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nur selaku pengajar di TPA Desa Towera, pada 29 September 2019

harapakan dapat meningkatkan penguatan ketahanan pangan bagi masyarakat Desa Towera.

7. Menggiatkan fasilitas usaha Kelompok Wanita

Tidak hanya itu, dari segi pemberdayaan ekonomi pun Pemerintah Desa Towera mengupayakan peningkatan-peningkatan, yaitu dengan mengadakan Kelompok Wanita hal ini memiliki tujuan yang sangat positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, program ini yaitu di peruntukan bagi kelompok wanita yang memiliki keterampilan menjahit jadi pemerintah membantu untuk mengembangkan keterampilan tersebut dengan memberikan bantuan pada tahun 2015 sebesar Rp. 19.245.000 yang di pergunakan dalam Pelatihan tentang Tatacara Pembuatan dan Pengolahan Minyak Kelapa Non Kolesterol dan pengadaan barang kepada kelompok PKK (dandang 20 kg 2 buah, tong air 5 buah, termos nasi 5 buah, djumbo air 5 buah kursi plastic 100 buah).

Pada tahun 2016 dana yang dialokasikan sebesar Rp. 8,186.500 di perunakan untuk pelatihan tata cara pembuatan piring lidi bagi kelompok perempuan. Pada Tahun 2017 juga di alokasikan dana sebesar Rp.9.000.000.- untuk pelatihan jahit menjahit. Kemudian pada tahun 2018 dana yang di terima sebesar Rp. 39.000.000.- yang di gunakan untuk pengadaan mesin jahit 6 unit, mesin obras 3 unit, mesin neci 3 unit, alat pres kancing 1 unit, jarum mesin jahit 4 lusin, jarum mesin obras dan neci masing masing 2 lusin , benag obras 1 lusin dan benag biasa 6 lusin. Pada tahun 2019 sebesar Rp. 69.900.000 yang di pergunakan untuk membeli perlengkapan pesta usaha perempuan (tenda/terpal 8 buah, kursi plastic 50 buah, kompor kaki bermata 100 2 buah, tong air besar 4 buah, dandang nasi 15 kg 2 buah, dan tenda besi 8 lokal.

Dari upaya yang dilakukan pemerintah diatas tidak terlepas dari Partisipasi aktif masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pemberdayaan ataupun

pembangunan diwilayahnya masing-masing sangatlah diperlukan, hal ini dikarenakan agar dari setiap program yang dilaksanakan, memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, dan sikap masyarakat setempat, serta menuntut masyarakat agar lebih memiliki rasa tanggung jawab, terutama terhadap program yang mereka inginkan sendiri.

Dalam wawancara dengan Ibu Nining selaku salah dari kelompok penerima bantuan tersebut menyampaikan :

“Alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur dengan adanya bantuan ini karena pendapatan setiap harinya mulai meningkat sejak adanya beberapa perlengkapan menjahit ini, di bandingkan dengan sebelumnya karena dulunya masi belum memiliki peralatan yang cukup “.

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.⁴⁸ Dalam surah Ar'rad ayat 11 yang menjelaskan :

لَهُر مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ تَحَفُّظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahannya:

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selaluh mengikutinya, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, Dan sekali-

⁴⁸ Titis Istikomah, “ Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui *Enterpreneurship Capacity Building*, (ECB) Dalam Perspetif Ekonomi Islam”, (Study Pada Kelompok Tani Kecamatan Talang Padang), Skripsi Program Strata 1 IAIN Lampung, 2015), h. 49.

kali mereka tidak mempunyai pelindung selain Dia. (QS. Ar-Rad Ayat 11)⁴⁹

(لَهُ) “Baginya”, yakni manusia (مُعْتَبَاتٌ) “ada pengikut-pengikut”, yakni malaikat-malaikat mengikutinya (مِّن بَيْن يَدَيْهِ) “di depannya” di mukanya (وَمِنْ خَلْفِهِ) “dan di belakangnya” di baliknya. (يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) “mereka menjaganya atas perintah Allah. Yakni berdasarkan perintahNya. Baik dari bangsa Jin maupun lainnya.

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ) “sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum”, maksudnya Allah tidak akan mencabut nikmatNya dari mereka (حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) “sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri “ dari keadaan yang baik dengan perbuatan maksiat.

(وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا) “ Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum” yakni mendatangkan adzab kepada mreka (فَلَا مَرَدَّ لَهُ) “niscaya tidak ada yang dapat menolaknya” baik dari malaikat malaikat yang mengikuti itu maupun lainnya. (وَمَا لَهُمْ) “dan sekali kali mereka tidak mempunyainya”, yakni orang-orang yang di kehendaki buruk oleh Allah itu (مِّن دُونِهِ) “di luar Allah”, maksudnya selain Allah (مِن) “dari” kata (مِن) di sini bersifat zaidah (tambahan) (وَالِ) “pelindung” yang dapat melindungi mereka dari adzabNya.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan ayat diatas menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola

⁴⁹ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Baqar As Suyuthi, *Tafsir Jalalain vol 6* (Surabaya : PT eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015)h.179

⁵⁰ *Ibid h.180*

dan membentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Towera untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Pemerintah Desa Towera sangat terbantu dengan adanya dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta berjalannya program pemberdayaan masyarakat. Dalam wawancara dengan Bapak Moh. Adil Rantesigi mengatakan bahwa:

“Dengan adanya dana desa, pemerintah desa mengajak dan merangkul seluruh masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan agar bisa ditingkatkan dari berbagai bidang, baik itu pemberdayaan kependudukannya, kesejahteraannya, perempuannya, dan sebagainya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita tingkatkan. Contohnya adalah dalam kegiatan kesehatan yaitu jambanisasi dan pengkaderan posyandu dan dalam bidang pendidikan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dibawah umur (PAUD).”⁵¹

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pemerintah Desa Towera berupaya mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah bagi pemerintahan desa yaitu mengelola dana desa dengan jujur dan amanah dengan merangkul semua pihak dalam pemberdayaan dan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadikan masyarakat mandiri, memiliki keterampilan serta berkreaitif dan berkompeten. Dalam pembangunan Sarana dan prasana desa dibangun bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, serta perekonomian. Dalam Surat Al-Qashash ayat 77 yang menjelaskan:

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Sekdes Desa Towera Bapak Moh. Adil Rantesigi, pada 1 Oktober 2019

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Terjemahannya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁵²

(*وَأَتَّبِعْ*) “*Dan inginkanlah*”, maksudnya carilah (*فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ*) “*Pada apa yang telah diberikan Allah kepadamu*”, yakni harta benda, (*الدَّارَ الْآخِرَةَ*) “*(kebahagiaan di) negeri Akhirat*” dengan cara membelanjakannya di dalam ketaatan kepada Allah, (*وَلَا تَنْسَ*) “*tetapi jangan melupakan*” yakni mengabaikan, (*نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا*) “*bagianmu dari dunia*” maksudnya berbuatlah untuk kepentingan Akhirat selama kamu di dunia.

(*وَأَحْسِنْ*) “*Dan berbuat baiklah*” kepada sesama manusia dengan cara membagikan sedekah, (*كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ*) “*sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau menginginkan*”, maksudnya mencari, (*الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ*) “*kerusakan di muka bumi*” dengan melakukan perbuatan maksiat. (*إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ*) “*sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan*” maksudnya Allah akan menghukum mereka.⁵³

Berdasarkan ayat tersebut kandungan yang sangat jelas bahwa kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran

⁵² Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Al-Qashash (28) ayat 77, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, h. 623.

⁵³ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Baqar As Suyuthi, *Tafsir Jalalain vol 2* (Surabaya : PT eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015)h.783

untuk memperoleh harta dan mencari harta tersebut dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

Manusia berkewajiban untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam mencari, menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di muka bumi, karena Allah telah membukakkan jalan untuk masyarakatnya dalam menggunakan potensi dan kemampuannya dalam pemberdayaan, tergantung kepada masyarakatnya dapat menggunakan program yang telah ada atau tidak.

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah Saw. Beliau memberikan contoh terkait dalam prinsip keadilan, kepemilikan dan keseimbangan, dan partisipasi ditengah tengah masyarakat.

sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an & Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat terdapat nilai-nilai dasar system ekonomi Islam, pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pada pemberdayaan Masyarakat seharusnya menerapkan system ekonomi Islam dalam Pemberdayaan yaitu Kepemilikan, Keseimbangan dan Keadilan.⁵⁴

a. Kepemilikan

Allah STW berfirman dalam surah Al-Maidah Ayat 120 yakni :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Terjemahannya :

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) “ *Milik Allahlah Kerajaan langit dan bumi*”, yakni perbendaharaan hujan, tumbu-tumbuhan, rizki dan lain-lain, (وَمَا فِيهِنَّ)

⁵⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta. Sinar Grafika,2008) h.5

“beserta isinya.” Di sini Allah menggunakan kata (مَا) dalam rangka mencakup makhluk yang tidak berakal. (وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) “ Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. Termaksud memberikan pahala kepada orang yang jujur dan menimpakan adzab kepada orang yang dusta. Dan akal mentakhshish (membatasi) Dzatnya, sehingga Allah tidak berkuasa atas Dzatnya sendiri.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan ayat di atas bahwa Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia tersebut hidup di dunia. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum, begitu pula dalam hal pemerintahan.

Pemerintah desa dapat memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat menjadi lebih baik secara perekonomian dan kualitas hidup.

b. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek Adapun Konsep keseimbangan dijelaskan dalam surah Al-Baqarah Ayat 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ



Terjemahannya :

⁵⁵ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Baqar As Suyuthi, *Tafsir Jalalain vol 1* (Surabaya : PT eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015)

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka".

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً) “Dan di antara mereka ada yang berdoa; ‘Ya Tuhan kami,berilah kami kebaikan di Dunia’.(وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً) “ Dan kebaikan di Akhirat” yaitu surge, (وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) “ Dan peliharalah kami dari Api Neraka” tiada masuk kedalamnya. Tujuannya ialah menganjurkan untuk mencari kebaikan di dunia dan akhirat.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwa konsep keseimbangan tidak hanya mengukur kebaikan dari hasil usaha yang di arahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga tentang kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus di pelihara antara keseimbangan antara hak dan kewajiban dan kewajiban dan kewajiban yang harus terealisasikan.

Dalam wawancara dengan Bapak Yusuk sebagai seorang toko agama berpendapat bahwa pemerintah Desa Towera pada pengelolaan Dana Desa bersama lembaga yang ada selalu bermusyawarah dalam menentukan arahan pembangunan dan pemberdayaan melalui program dana desa.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa konsep keseimbangan pada pengelolaan dana desa di Desa Towera telah terealisasi dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Desa Towera.

c. Keadilaan

Konsep kepemilikan sangat penting dalam kehidupan sehari hari sebagaimana dalam surah Al- An-nisa ayat 58 yaitu :

⁵⁶ Ibid .

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ .

Terjemahannya :

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan ayat diatas pemerintah desa seharusnya dapat melaksanakan kadilan yang merata bagi masyarakat selaku objek dalam pemberdayaan.

Dari wawancara dengan bapak Dahlan selaku masyarakat Desa Towera mengatakan bahwa pemberdayaan yang di laksanakan pemerintah desa berdasar dari kesepakatan bersama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat , dari usulan-usulan yang di ambil dari perwakilan dusun yang berpartisipasi pada musyawarah desa.

Berdasarkan penjelasan dan wawancara yang ada terkait keadilan dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pengelolaan dana desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai usulan dari perwakilan masyarakat desa.

⁵⁷ Ibid

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan oleh penulis, tentang peran bantuan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Towera dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa perlu diapresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan. Sejauh ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Towera yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, Posyandu, dan gorong-gorong dan lainnya adalah program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Towera. Akan tetapi dana desa yang di salurkan dalam bidang pemberdayaan dananya belum terkelolah dengan baik dikarenakan belum adanya timbal balik dari masyarakat ke pemerintah.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa mengikut apa yang telah dilakukan Rasulullah pada masanya bersama masyarakat merupakan wujud keinginan masyarakat Desa Towera untuk lebih maju dan berkembang. Partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya program dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, kemandirian dan kepribadian yang bertanggungjawab. Sesuai dengan kandungan isi dari surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab

kemunduran mereka. Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Towera telah mencerminkan nilai-nilai dasar dari ekonomi Islam yang mana pada masa Rasulullah juga di terapkan yaitu :

- a. Kepemilikan, disini Pemerintah desa hanya dapat memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perkonomi masyarakat, bukan untung menguasainya karena pemerintah tidak memiliki hak mutlak untuk dana desa tersebut karena butu pertanggung jawaban
- b. Keseimbangan, pada hal ini pemerintah harus seimbang dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan dengan lancer sebagaimana mestinya
- c. Keadilan, yang dimaksudkan disini adalah bahwa pemeritah tidak boleh menetapkan secara sepihak dalam meningkatkan pemberdayaan, melainkan harus melihat dari kebutuhan masyarakat yang di putuskan pada saat musyawarah bersama.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di Desa Towera, maka penulis memiliki beberapa saran, yakni:

1. Saran Kepada Pemerintah

Pemberdayaan masyarakat alangkah lebih baiknya tidak hanya mengarah pada pembangunan infrastruktur saja, penggalian potensi yang ada di masyarakat harus mulai dilakukan atau dilaksanakan, agar masyarakat mampu berkembang. Contohnya pembuatan kelompok-kelompok Ekonomi kreatif, pengadaan mekanisme pasar desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang mandiri. Dan mengharapakan pemerintah lebih mementingkan pendidikan anak, dimana disini

kebanyakan masyarakat kurang mampu menyekolakan anaknya sedangkan anak tersebut berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Saran Kepada Masyarakat

Masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian dan terlaksananya pemberdayaan masyarakat serta baiknya masyarakat mampu menggali lebih dalam lagi potensi apa yang ada di masyarakat, sehingga kedepannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 , h.29 – 41 <https://core.ac.uk/download/pdf/48593374.pdf> di akses pada 01 Juni 2019.
- A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, jakarta, Bee Media Pustaka, 2015
- Depertemen Pendidikan nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h.420
- Endang Juliana, *Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/2266> , di akses pada 24 Juni 2019, pukul 18.51
- “Pemberdayaan Masyarakat”. Wikipedia The Free Eneyyclopedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat di akses pada 23 juni 2019
- Pejabat pengelolaan Informasii dan doumentasi (PPID). “Regulasi Peraturan Dana Desa” Situs resmi ppidKemkominfo. <https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/peraturan-dana-desa/> di akses pada 26 juni 2019 11.05<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>
- Intine Belajar “Hadist Arbaint tentang tolong menolong” situs resmi intinebelajar. [https://intinebelajar.blogspot.com/2016/12/hadits - Arbain- tentang - tolong -menolong .html](https://intinebelajar.blogspot.com/2016/12/hadits_-_Arbain-_tentang_-_tolong_-_menolong_.html) di akses pada 16 juli 2019 18.30
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(cet.XIII;Bandung:Remaja Rosda Karya, 2000)
- Mutthoriq dkk, “Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No 3, h.426-432.
- M.Rinaldi Aulia, *Analisis Pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa, di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015*, Skripsi <https://etd.unsyiah.ac.id> di akses pada 29 Mei 2019
- Rivan Nugraha, Peran Program Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat, (Studi deskriptif di Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung kabupaten

cianjur). <http://digihb.uinsgd.ac.id/3934/> Diakses pada 22 Juni 2019, pukul 14.28

Risma Hafid, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep 2016*, Skripsi <https://repository.unhas.ac.id> di akses pada 29 Mei 2019

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat Dan Pekerjaan Sosial, Cet.5,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)

Suwardianto Sigit, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman* 18. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pls/article/viewFile/636/630> di akses pada 28 juni 2019 16.36

Sulistiyani Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media.

Stiawan Abdul Aziz, “*Prinsip, motif dan paradigm ekonomi islam,*” dalam suara Hidayatullah, edisi 08/XVIII/Desember 2005

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Baqar As Suyuthi, *Tafsir Jalalain vol 1 - 3*”(Surabaya : PT eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015)

Sumber data “*Lampiran APDES rekap DRK*” Desa Towera kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong. Tahun 2015-2019